

Senin, 8 Oktober 2012

## Andriyus: Kami Hanya Mengingatkan Pemkab

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Program Jamkesda Belum Memadai dan Terdapat Sisa Dana Kegiatan Jamkesda Sebesar Rp3.041.097.438,00 Yang Belum Disetorkan ke Kas Daerah.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Tranfer Sebesar Rp2.798.796.084,00 Belum Dilengkapi Dengan Laporan Pertanggungjawaban.
3. Realisasi Belanja Minimal Sebesar Rp2.265.022.000,00 Tidak Tepat Diklasifikasikan Sebagai Belanja Bantuan Sosial.
4. Tagihan Retribusi atas Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau oleh Pihak III sebesar Rp247.426.578,30 Bermasalah.

LAPORAN BPK RI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMKAB SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2011 DI TEMUKAN KETIDAKPATUHAN, KECURANGAN DAN KETIDAKPATUTAN TERHADAP UNDANG-UNDANG.

FOTO: ABANG INDIRA

### Sanggau, BERKAT.

Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Sanggau, Yohanes Andriyus Wijaya, SE menyambut baik stamen berbagai pihak terkait Pandangan Akhir (PA) Fraksi PKPB yang menyatakan adanya dugaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menguras APBD. Meskipun komentar yang muncul

menentang pernyataan F-PKPB, setidaknya diharapkan oknum PNS yang merasa dapat berpikir dua kali melakukan tindakan korupsi tersebut. Pria yang akrab disapa Andre itu juga menyampaikan apresiasi terhadap komentar masyarakat yang mendukung pernyataan F-PKPB.

Menurutnya, PA F-PKPB tidak tendensius dalam menyampaikan pendapat.

Tujuan dari semuanya itu menurut Andre agar Pemkab Sanggau semakin baik dalam mengelola keuangan daerah yang telah diamanahkan masyarakat kepada Pemkab.

Demikian disampaikan pria berkacamata itu ketika ditemui minggu kemarin (7/10) di kediamannya jalan Pancur Aji kelurahan Bunut.

Andre memaparkan, bahwa pihaknya mengeluarkan statmen seperti itu memiliki dasar. Salah satunya ketika merujuk pada laporan BPK RI tentang penganggaran perjalanan dinas SKPD tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp.53.062.559.400 yang terealisasi mencapai Rp.49.002.418.000. Jika dihitung untuk seluruh SKPD, maka perjalanan dinas pejabat selama satu bulan sebesar Rp.4 milyar.

"Bayangkan saja sebesar itu anggaran perjalanan dinas pejabat kita satu bulan. Masuk akal tidak. Padahal, tidak semua SKPD yang melakukan perjalanan dinas. Inikan pemborosan yang sangat luar biasa terhadap anggaran kita," kata mantan Anggota Dewan dua periode itu.

Ia menambahkan, jika diperhatikan dengan teliti, laporan BPK tahun 2004-2011 sekarang ini. Yang paling parah adalah laporan yang dirilis BPK terhadap

pengelolaan anggaran Pemkab Sanggau tahun anggaran 2011 yang secara tegas menulis bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyampaikan beberapa poin penting diantaranya pertanggungjawaban program Jamkesda yang dinilai belum memadai dan terdapat sisa dana program Jamkesda sebesar Rp.3.014.097.438 yang belum disetorkan ke kas daerah.

Kemudian realisasi bantuan belanja bantuan sosial, belanja hibah, bantuan keuangan dan transper sebesar Rp.2.798.796.084 belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, realisasi belanja minimal sebesar Rp.2.265.022.000 tidak tepat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Kemudian tagihan retribusi atas pemanfaatan tanah milik pemerintah kabupaten sanggau oleh pihak ketiga sebesar Rp.247.426.578 dinilai bermasalah.

"Kalau melihat laporan itu, kuat dugaan saya ada oknum yang memperkaya diri. Tujuan kami agar pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah semakin hari semakin baik. Sama sekali tidak ada tendensi apapun," tegasnya. (iin)